

ARTIKEL ANALISIS

Globalisasi Baru, Aturan Baru, Pemenang Baru

*Membaca pergeseran kekuasaan, teknologi, aturan, dan peluang
Indonesia dalam ekonomi dunia yang terfragmentasi*

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, Ph.D.

www.rudycr.com/cv.pdf

RudyCT Academic Series • 2026

GLOBALISASI BARU | KETERBUKAAN STRATEGIS | NILAI TAMBAH



GLOBALISASI BARU, ATURAN BARU, PEMENANG BARU



EFISIENSI
BIAYA



KETERBUKAAN
STRATEGIS



KAPABILITAS
NASIONAL

Oleh: Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, Ph.D.

www.rudyct.com/cv.pdf

Abstrak

Globalisasi tidak berakhir; ia berganti logika. Integrasi yang selama beberapa dekade terutama didorong oleh efisiensi biaya kini dibentuk pula oleh keamanan ekonomi, teknologi digital, transisi hijau, subsidi industri, standar data, dan persaingan geopolitik. Artikel ini menjelaskan bagaimana perubahan tersebut melahirkan aturan baru dan memindahkan sumber keunggulan dari tenaga kerja murah menuju penguasaan pengetahuan, infrastruktur, pembiayaan, standar, serta kemampuan mengelola risiko. Dengan menempatkan Indonesia sebagai fokus, tulisan ini berargumen bahwa pemenang globalisasi baru bukan negara yang paling menutup diri atau yang paling terbuka tanpa syarat, melainkan negara yang mampu menjalankan keterbukaan strategis: tetap terhubung dengan banyak pasar sambil memperbesar nilai tambah domestik, memperkuat kapasitas teknologi, menjamin persaingan sehat, melindungi kelompok yang menanggung biaya penyesuaian, dan menjaga keberlanjutan ekologis. Agenda kebijakan yang diajukan mencakup diversifikasi mitra, kebijakan industri berbasis disiplin kinerja, penguatan talenta dan riset, tata kelola data, pembiayaan hijau, serta diplomasi ekonomi yang konsisten.

Kata Kunci: globalisasi baru; fragmentasi geoekonomi; rantai nilai global; kebijakan industri; ekonomi digital; transisi hijau; ketahanan ekonomi; Indonesia

Pengantar Kerangka Analisis

Judul “Globalisasi Baru, Aturan Baru, Pemenang Baru” mengandung tiga proposisi. Pertama, globalisasi baru berarti hubungan lintas batas tidak menghilang, tetapi saluran, aktor, dan pertimbangannya berubah. Kedua, aturan baru muncul bukan hanya melalui perjanjian dagang, melainkan juga lewat standar karbon, tata kelola data, kontrol ekspor, subsidi, uji keamanan investasi, dan keputusan platform. Ketiga, pemenang baru tidak ditentukan semata oleh upah murah atau kelimpahan sumber daya. Keunggulan semakin berasal dari kemampuan mengombinasikan teknologi, talenta, pembiayaan, institusi, dan akses jaringan. Ketiga proposisi tersebut menjadi benang merah tulisan ini.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa dikotomi terbuka versus tertutup telah kehilangan banyak daya jelasnya. Sebuah negara dapat sangat terbuka pada perdagangan tetapi bergantung pada satu pemasok kritis; dapat membatasi impor namun tetap tergantung pada perangkat lunak, pembiayaan, dan mesin luar negeri; atau dapat menarik investasi besar tetapi gagal membangun pengetahuan domestik. Pertanyaan yang lebih berguna ialah bentuk keterhubungan apa yang menghasilkan pembelajaran, pilihan, dan ketahanan. Dengan demikian, keterbukaan strategis bukan proteksionisme yang diganti nama. Ia merupakan pengelolaan portofolio hubungan: cukup luas untuk memperoleh skala dan inovasi, cukup beragam untuk menyerap guncangan, dan cukup tertanam di dalam negeri untuk menyebarkan nilai tambah.

Metode yang digunakan bersifat naratif-analitis. Literatur ekonomi politik internasional dipertemukan dengan kajian rantai nilai global, ekonomi digital, kebijakan industri, ketenagakerjaan, dan transisi hijau. Statistik kelembagaan dipakai sebagai penanda arah, bukan sebagai ramalan mekanis. OECD, misalnya, melaporkan bahwa keterlibatan rantai nilai global secara riil tetap tinggi pada 2024; temuan ini menahan kesimpulan bahwa dunia sedang melakukan reshoring secara menyeluruh. Pada saat yang sama, IMF menunjukkan bahwa kedekatan geopolitik makin relevan bagi arus investasi, terutama pada sektor strategis. Kombinasi keduanya menunjukkan rekonfigurasi, bukan penghilangan, globalisasi (International Monetary Fund, 2023; OECD, 2026).

1. Pendahuluan: Globalisasi Tidak Mati, tetapi Berganti Tata Bahasa

Narasi deglobalisasi sering terlalu sederhana karena menyamakan perlambatan arus tertentu dengan berakhirnya keterhubungan dunia. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, perdagangan barang tetap besar sementara jasa digital, data, pengetahuan, dan pembayaran lintas batas berkembang. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Goldberg & Reed, 2023; OECD, 2026)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, pandemi, perang, sanksi, dan gangguan logistik memperlihatkan bahwa efisiensi tanpa cadangan dapat menciptakan kerapuhan. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Goldberg & Reed, 2023; OECD, 2026)

Dari perspektif negara, pemerintah kembali menjadi perancang pasar melalui subsidi, pengadaan, regulasi, dan investasi publik. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak

otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Goldberg & Reed, 2023; OECD, 2026)

Dimensi sosialnya terlihat ketika perusahaan menilai pemasok bukan hanya dari harga, tetapi juga dari keandalan, lokasi politik, jejak karbon, dan keamanan data. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Goldberg & Reed, 2023; OECD, 2026)

Dilihat dari hubungan internasional, negara berkembang menghadapi peluang relokasi produksi sekaligus risiko menjadi pemasok komoditas dan pasar digital. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Goldberg & Reed, 2023; OECD, 2026)

Bagi Indonesia, Indonesia perlu membaca perubahan sebagai pergeseran struktur insentif, bukan sebagai alasan untuk autarki. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Goldberg & Reed, 2023; OECD, 2026)

2. Dari Hiperglobalisasi menuju Keterbukaan Strategis

Fase hiperglobalisasi mengutamakan pengurangan hambatan dan penyebaran produksi, sedangkan fase baru menambahkan batas-batas strategis pada keterbukaan. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, liberalisasi memperluas pasar dan menurunkan harga, tetapi keuntungan dan biaya penyesuaian tidak terbagi merata. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Rodrik, 2018; Autor et al., 2016)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, ketidakpuasan sosial tumbuh ketika pekerjaan menghilang lebih cepat daripada keterampilan, perlindungan sosial, dan wilayah dapat menyesuaikan. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Rodrik, 2018; Autor et al., 2016)

Dari perspektif negara, keterbukaan strategis mengakui manfaat perdagangan sekaligus membedakan barang biasa dari teknologi atau input yang kritis. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Rodrik, 2018; Autor et al., 2016)

Dimensi sosialnya terlihat ketika de-risking berbeda dari decoupling karena tujuannya mengurangi ketergantungan berlebihan, bukan memutus semua hubungan. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Rodrik, 2018; Autor et al., 2016)

Dilihat dari hubungan internasional, friend-shoring dapat memperkecil risiko politik tetapi juga menaikkan biaya dan membentuk blok-blok ekonomi. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Rodrik, 2018; Autor et al., 2016)

Bagi Indonesia, ruang kebijakan nasional membesar, namun disiplin multilateral tetap dibutuhkan agar keamanan tidak menjadi dalih proteksionisme permanen. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Rodrik, 2018; Autor et al., 2016)

3. Geopolitik, Fragmentasi, dan Interdependensi yang Dipersenjata

Jaringan global tidak netral: pusat keuangan, standar teknologi, semikonduktor, platform, dan jalur logistik dapat menjadi sumber kekuasaan. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, negara yang menguasai simpul jaringan memperoleh kemampuan melihat arus informasi dan membatasi akses pihak lain. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Farrell & Newman, 2019; International Monetary Fund, 2023)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, sanksi finansial, kontrol ekspor, daftar entitas, serta pembatasan investasi mempertemukan kebijakan keamanan dengan kebijakan ekonomi. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewati kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Farrell & Newman, 2019; International Monetary Fund, 2023)

Dari perspektif negara, fragmentasi mengubah arah investasi asing karena keselarasan geopolitik menjadi variabel lokasi. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Farrell & Newman, 2019; International Monetary Fund, 2023)

Dimensi sosialnya terlihat ketika negara nonblok menghadapi tekanan memilih pihak, tetapi juga dapat menjadi simpul penghubung jika institusinya dipercaya. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan

pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Farrell & Newman, 2019; International Monetary Fund, 2023)

Dilihat dari hubungan internasional, ketergantungan asimetris lebih berbahaya daripada ketergantungan tinggi yang tersebar dan dapat diganti. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Farrell & Newman, 2019; International Monetary Fund, 2023)

Bagi Indonesia, diplomasi ekonomi Indonesia harus menjaga otonomi keputusan tanpa mengabaikan realitas standar dan teknologi yang dikuasai kekuatan besar. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Farrell & Newman, 2019; International Monetary Fund, 2023)

4. Rantai Nilai Global: Dari Just-in-Time menuju Just-in-Case

Ketahanan rantai pasok tidak identik dengan memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri, melainkan dengan membangun kemampuan mengantisipasi, menyerap, dan pulih dari gangguan. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, persediaan minimum dan pemasok tunggal efisien pada masa normal tetapi mahal ketika pelabuhan, energi, atau komponen terganggu. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan

pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Gereffi, 2020; Baldwin & Freeman, 2022)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, diversifikasi geografis, pemasok ganda, transparansi tingkat kedua dan ketiga, serta stok strategis memberi redundansi yang terukur. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Gereffi, 2020; Baldwin & Freeman, 2022)

Dari perspektif negara, reshoring penuh sering tidak ekonomis karena skala, keahlian, dan ekosistem pemasok telah tersebar lintas negara. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Gereffi, 2020; Baldwin & Freeman, 2022)

Dimensi sosialnya terlihat ketika perusahaan besar dapat memindahkan risiko kepada pemasok kecil sehingga kebijakan ketahanan perlu memperhatikan pembagian biaya. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Gereffi, 2020; Baldwin & Freeman, 2022)

Dilihat dari hubungan internasional, digital twin, analitik prediktif, dan pelacakan memperkuat visibilitas tetapi menambah risiko siber dan ketergantungan perangkat lunak. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan

negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Gereffi, 2020; Baldwin & Freeman, 2022)

Bagi Indonesia, Indonesia perlu mengukur ketahanan per sektor: pangan, obat, energi, telekomunikasi, mineral kritis, dan komponen industri memiliki profil berbeda. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Gereffi, 2020; Baldwin & Freeman, 2022)

Inti kebijakan. Ketahanan terbaik biasanya lahir dari diversifikasi dan transparansi, bukan dari swasembada total.

5. Digitalisasi, Kecerdasan Artifisial, dan Ekonomi Tanpa Jarak

Teknologi digital menurunkan biaya pencarian, penyalinan, pengiriman informasi, pelacakan, dan verifikasi, tetapi sekaligus mendorong konsentrasi pasar. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, platform mempertemukan produsen dan konsumen lintas batas dengan cepat, namun efek jaringan membuat pemenang dapat menguasai data dan gerbang pasar. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Goldfarb & Tucker, 2019; Strange & Zucchella, 2017)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, AI mengubah perdagangan jasa karena sebagian pekerjaan kognitif dapat diproduksi, dipantau, dan diserahkan dari lokasi berbeda. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewati kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Goldfarb & Tucker, 2019; Strange & Zucchella, 2017)

Dari perspektif negara, komputasi awan, pusat data, kabel bawah laut, cip, dan model fondasi menjadi infrastruktur strategis globalisasi baru. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Goldfarb & Tucker, 2019; Strange & Zucchella, 2017)

Dimensi sosialnya terlihat ketika aturan aliran data, privasi, keamanan siber, dan lokasi penyimpanan menentukan siapa dapat mengekstraksi nilai dari aktivitas digital. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Goldfarb & Tucker, 2019; Strange & Zucchella, 2017)

Dilihat dari hubungan internasional, UMKM memperoleh akses pasar baru tetapi menghadapi biaya iklan, komisi, ketergantungan algoritme, dan lemahnya daya tawar. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi

dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Goldfarb & Tucker, 2019; Strange & Zucchella, 2017)

Bagi Indonesia, Indonesia perlu menghindari pilihan palsu antara inovasi dan kedaulatan dengan membangun interoperabilitas, persaingan, dan kapasitas komputasi. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Goldfarb & Tucker, 2019; Strange & Zucchella, 2017)

6. Transisi Hijau sebagai Rezim Perdagangan Baru

Dekarbonisasi bukan lagi agenda lingkungan yang terpisah, melainkan faktor yang mengubah biaya modal, standar produk, teknologi, dan akses pasar. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, pengukuran emisi produk, ketertelusuran bahan baku, dan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan menciptakan kewajiban data baru. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (World Bank, 2023; OECD, 2025)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, subsidi teknologi bersih mempercepat investasi tetapi dapat memicu perlombaan fiskal yang sulit diikuti negara berkembang. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan

tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (World Bank, 2023; OECD, 2025)

Dari perspektif negara, mineral kritis memberi peluang hilirisasi, namun nilai jangka panjang bergantung pada energi bersih, efisiensi, teknologi, dan daur ulang. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (World Bank, 2023; OECD, 2025)

Dimensi sosialnya terlihat ketika standar hijau dapat menjadi katalis peningkatan mutu atau hambatan terselubung apabila desainnya mengabaikan kapasitas berbeda. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (World Bank, 2023; OECD, 2025)

Dilihat dari hubungan internasional, pembiayaan transisi memerlukan taksonomi yang kredibel agar label hijau tidak menggantikan penurunan emisi yang nyata. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (World Bank, 2023; OECD, 2025)

Bagi Indonesia, Indonesia harus menghubungkan kebijakan industri dengan peta jalan listrik rendah karbon, pemulihan ekologis, dan manfaat bagi masyarakat lokal. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah

memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (World Bank, 2023; OECD, 2025)

7. Kebangkitan Kebijakan Industri dan Negara Wirausaha

Kebijakan industri kembali diterima karena pasar tidak selalu mengoordinasikan investasi besar, pembelajaran teknologi, dan infrastruktur secara serentak. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, dukungan publik dapat mengatasi kegagalan koordinasi ketika pabrik, pemasok, keterampilan, logistik, dan permintaan harus tumbuh bersama. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Mazzucato, 2013; Lin & Chang, 2009)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, subsidi tanpa sasaran dan evaluasi berisiko mempertahankan perusahaan tidak produktif serta membuka perburuan rente. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Mazzucato, 2013; Lin & Chang, 2009)

Dari perspektif negara, disiplin kinerja membutuhkan tonggak investasi, ekspor, produktivitas, riset, kandungan pengetahuan, dan batas waktu bantuan. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan

masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Mazzucato, 2013; Lin & Chang, 2009)

Dimensi sosialnya terlihat ketika pengadaan pemerintah dapat membentuk pasar awal bagi inovasi lokal bila spesifikasinya berbasis fungsi dan prosesnya transparan. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Mazzucato, 2013; Lin & Chang, 2009)

Dilihat dari hubungan internasional, kebijakan persaingan harus berjalan bersama kebijakan industri agar juara nasional tidak berubah menjadi monopoli yang membebani konsumen. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Mazzucato, 2013; Lin & Chang, 2009)

Bagi Indonesia, bagi Indonesia, hilirisasi perlu bergeser dari larangan ekspor semata menuju ekosistem teknologi, pemasok, talenta, dan energi yang kompetitif. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Mazzucato, 2013; Lin & Chang, 2009)

8. Siapa Pemenang Baru?

Pemenang globalisasi baru adalah negara, kota, perusahaan, dan pekerja yang menguasai komplementaritas antara konektivitas global dan kapabilitas lokal. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, negara dengan institusi dapat dipercaya menurunkan premi risiko ketika perusahaan mencari lokasi alternatif. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 2009)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, ekosistem yang menyatukan universitas, pemasok, pembiayaan, standar mutu, dan perusahaan jangkar lebih menarik daripada insentif pajak tunggal. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 2009)

Dari perspektif negara, perusahaan yang memiliki aset tak berwujud, merek, desain, perangkat lunak, dan hubungan pelanggan menangkap margin lebih besar. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 2009)

Dimensi sosialnya terlihat ketika pekerja dengan kemampuan memecahkan masalah, berkolaborasi dengan mesin, dan belajar ulang memperoleh peluang lebih baik daripada pekerjaan rutin. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 2009)

Dilihat dari hubungan internasional, wilayah yang terhubung secara fisik dan digital dapat menerima investasi, sedangkan wilayah tertinggal berisiko makin jauh. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 2009)

Bagi Indonesia, kemenangan nasional harus diukur dengan produktivitas, upah riil, mobilitas sosial, resiliensi, dan kualitas lingkungan, bukan nilai ekspor bruto saja. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Hidalgo et al., 2007; Hidalgo & Hausmann, 2009)

Inti kebijakan. Pemenang sejati memperbesar kapabilitas yang dapat diperbarui, bukan hanya menikmati rente dari posisi sementara.

9. Siapa yang Berisiko Tertinggal?

Setiap transformasi menciptakan biaya penyesuaian, dan legitimasi globalisasi baru bergantung pada kemampuan kebijakan mengelola biaya tersebut secara adil. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, pekerja rutin menghadapi otomasi dan kompetisi lintas batas tanpa selalu memiliki waktu serta dana untuk beralih profesi. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Autor et al., 2016; Acemoglu & Restrepo, 2020)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, UMKM dapat tersisih oleh kewajiban sertifikasi, data, dan jejak karbon yang dirancang untuk perusahaan besar. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewati kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Autor et al., 2016; Acemoglu & Restrepo, 2020)

Dari perspektif negara, negara berpendapatan rendah sulit mengikuti perlombaan subsidi dan harus membayar teknologi, lisensi, serta pembiayaan lebih mahal. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Autor et al., 2016; Acemoglu & Restrepo, 2020)

Dimensi sosialnya terlihat ketika daerah penghasil sumber daya menanggung beban ekologis sementara keuntungan, kantor pusat, dan pengetahuan terkonsentrasi di kota lain. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Autor et al., 2016; Acemoglu & Restrepo, 2020)

Dilihat dari hubungan internasional, konsumen berpendapatan rendah paling sensitif terhadap kenaikan harga akibat proteksi, gangguan logistik, dan transisi energi yang tidak tertata. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Autor et al., 2016; Acemoglu & Restrepo, 2020)

Bagi Indonesia, mekanisme kompensasi harus bersifat produktif melalui pendidikan, mobilitas, infrastruktur, dan perlindungan sosial adaptif, bukan bantuan sesaat. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Autor et al., 2016; Acemoglu & Restrepo, 2020)

10. Indonesia di Persimpangan Globalisasi Baru

Ukuran pasar, demografi, posisi maritim, keanekaragaman hayati, dan sumber daya memberi Indonesia modal tawar, tetapi modal itu tidak otomatis menjadi daya saing. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk

membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, pasar domestik besar menarik investasi sekaligus dapat membuat perusahaan puas menjual di dalam negeri tanpa mencapai standar ekspor. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Kano et al., 2020; World Bank, 2020)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, bonus demografi berubah menjadi dividen hanya jika kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan vokasi, dan penciptaan kerja produktif berjalan bersama. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Kano et al., 2020; World Bank, 2020)

Dari perspektif negara, letak di jalur laut strategis perlu diterjemahkan menjadi pelabuhan efisien, konektivitas antarpulau, industri maritim, dan keamanan logistik. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Kano et al., 2020; World Bank, 2020)

Dimensi sosialnya terlihat ketika nikel dan mineral lain membuka pintu industrialisasi namun ketergantungan pada satu komoditas, teknologi, atau negara investor menambah kerentanan. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas

kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Kano et al., 2020; World Bank, 2020)

Dilihat dari hubungan internasional, ASEAN dapat menjadi skala regional bagi produksi, regulasi digital, energi, dan manajemen bencana. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Kano et al., 2020; World Bank, 2020)

Bagi Indonesia, kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan kualitas birokrasi menentukan apakah keunggulan alam berubah menjadi kemampuan yang dapat diperbarui. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Kano et al., 2020; World Bank, 2020)

11. Agenda Keterbukaan Strategis Indonesia

Strategi yang masuk akal bukan memilih antara pasar dan negara, melainkan memperbaiki kapasitas keduanya serta hubungan akuntabel di antara keduanya. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, diversifikasi perjanjian, mitra investasi, sumber teknologi, rute logistik, dan mata uang penyelesaian mengurangi titik kegagalan tunggal. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan

pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Rodrik, 2004; Hausmann et al., 2007)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, peta jalan sektor harus memilih masalah yang hendak dipecahkan dan menetapkan indikator keluaran, bukan sekadar daftar proyek. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Rodrik, 2004; Hausmann et al., 2007)

Dari perspektif negara, reformasi pendidikan perlu menekankan literasi, numerasi, sains, bahasa, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Rodrik, 2004; Hausmann et al., 2007)

Dimensi sosialnya terlihat ketika infrastruktur mutu berupa metrologi, laboratorium, sertifikasi, dan akreditasi menentukan kemampuan pemasok memasuki rantai bernilai tinggi. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Rodrik, 2004; Hausmann et al., 2007)

Dilihat dari hubungan internasional, arsitektur data publik harus aman, dapat dipertukarkan, dan memberi ruang inovasi tanpa mengorbankan hak warga. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Rodrik, 2004; Hausmann et al., 2007)

Bagi Indonesia, kebijakan fiskal dan pembiayaan pembangunan perlu memprioritaskan proyek yang menghasilkan pembelajaran, produktivitas, dan penurunan emisi terukur. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Rodrik, 2004; Hausmann et al., 2007)

Inti kebijakan. Keterbukaan strategis menuntut prioritas yang jelas, disiplin evaluasi, dan banyak pilihan mitra.

12. Tata Kelola, Ukuran Keberhasilan, dan Disiplin Evaluasi

Globalisasi baru memperbesar peran kebijakan diskresioner, sehingga transparansi dan evaluasi menjadi lebih penting, bukan kurang penting. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, setiap insentif perlu memiliki dasar masalah, penerima yang jelas, biaya fiskal, target waktu, serta kriteria penghentian. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung

guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Harrison & Rodríguez-Clare, 2010; OECD, 2024)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, data nilai tambah domestik lebih informatif daripada ekspor bruto karena membedakan impor antara yang dipakai secara produktif dan kebocoran manfaat. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewati kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Harrison & Rodríguez-Clare, 2010; OECD, 2024)

Dari perspektif negara, indikator harus mencakup produktivitas faktor, upah, kualitas kerja, jumlah pemasok lokal, paten, ekspor jasa, emisi, dan pemulihan lahan. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Harrison & Rodríguez-Clare, 2010; OECD, 2024)

Dimensi sosialnya terlihat ketika lembaga audit, parlemen, media, akademisi, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menguji klaim keberhasilan. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Harrison & Rodríguez-Clare, 2010; OECD, 2024)

Dilihat dari hubungan internasional, koordinasi pusat-daerah penting karena izin, lahan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur berada pada tingkat kewenangan berbeda. Aturan nasional kini berinteraksi

dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Harrison & Rodríguez-Clare, 2010; OECD, 2024)

Bagi Indonesia, kebijakan adaptif memerlukan eksperimen terbatas, evaluasi independen, serta kesediaan memperbaiki atau menutup program yang gagal. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Harrison & Rodríguez-Clare, 2010; OECD, 2024)

13. Skenario Masa Depan: Tiga Dunia yang Mungkin

Perencanaan perlu menghadapi ketidakpastian melalui skenario, bukan berpura-pura mengetahui satu ramalan yang pasti. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, skenario rekoneksi menggambarkan pembaruan multilateral, standar interoperabel, dan perdagangan hijau yang relatif terbuka. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (International Monetary Fund, 2023; World Trade Organization, 2023)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, skenario blok kompetitif memperlihatkan rantai pasok, teknologi, dan pembayaran terbagi menurut aliansi politik. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa

desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (International Monetary Fund, 2023; World Trade Organization, 2023)

Dari perspektif negara, skenario kepulauan krisis berisi gangguan iklim, konflik, proteksi pangan, serangan siber, dan volatilitas keuangan yang saling memperkuat. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (International Monetary Fund, 2023; World Trade Organization, 2023)

Dimensi sosialnya terlihat ketika strategi tanpa penyesalan mencakup pendidikan, energi bersih, kesehatan fiskal, diversifikasi, keamanan siber, dan pemerintahan tepercaya. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (International Monetary Fund, 2023; World Trade Organization, 2023)

Dilihat dari hubungan internasional, opsi kebijakan harus dinilai dari ketangguhan di beberapa skenario, bukan hanya hasil tertinggi pada satu asumsi. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (International Monetary Fund, 2023; World Trade Organization, 2023)

Bagi Indonesia, Indonesia sebaiknya memelihara kemampuan menjembatani blok sambil menyiapkan substitusi darurat untuk input yang benar-benar kritis. Pertanyaan operasionalnya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (International Monetary Fund, 2023; World Trade Organization, 2023)

Inti kebijakan. Investasi tanpa penyesalan memperkuat hasil dalam hampir semua masa depan yang masuk akal.

14. Penutup: Menjadi Pemenang tanpa Menciptakan Kekalahan yang Permanen

Tujuan akhir bukan memenangkan perlombaan statistik jangka pendek, melainkan membangun kapasitas nasional yang produktif, adil, demokratis, dan lestari. Proposisi ini menjadi titik masuk untuk membaca perubahan kebijakan, strategi perusahaan, distribusi sosial, dan pilihan Indonesia secara terpadu.

Secara konseptual, keterbukaan memberi disiplin dan akses pengetahuan, sedangkan kebijakan publik membentuk kemampuan agar manfaatnya tidak berhenti pada segelintir pelaku. Hal ini penting karena keputusan ekonomi tidak dibuat di ruang hampa: perusahaan membandingkan biaya, risiko, akses pasar, dan kepastian aturan, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan pekerjaan, keamanan, penerimaan publik, dan legitimasi. Jika hanya satu dimensi yang dihitung, kebijakan mudah menghasilkan kemenangan semu. Harga dapat turun tetapi kemampuan domestik melemah; ekspor dapat naik tetapi nilai tambah dan pengetahuan tetap berada di luar negeri. Karena itu, analisis perlu menelusuri siapa yang menguasai aset kritis, siapa yang menanggung guncangan, serta apakah manfaat hari ini meningkatkan pilihan pada masa depan. (Gereffi et al., 2022; Rodrik, 2018)

Dari sudut perusahaan dan rantai nilai, ketahanan yang sehat mengurangi titik rawan tanpa mengorbankan semua manfaat spesialisasi. Implikasinya bukan bahwa setiap tahap produksi harus dikuasai sendiri, melainkan bahwa titik yang paling menentukan perlu dikenali. Titik itu dapat berupa desain, kekayaan intelektual, mesin, data, standar, pembiayaan, jaringan distribusi, atau hubungan dengan konsumen. Negara yang hanya menghitung jumlah pabrik dapat melewatkan kenyataan bahwa

margin dan keputusan strategis berada pada simpul lain. Kebijakan yang baik membantu pelaku domestik bergerak menuju fungsi bernilai tinggi, tanpa memaksa kandungan lokal yang mahal dan tidak produktif. Pembelajaran pemasok, transfer keterampilan, dan persaingan menjadi jembatan antara investasi hari ini dan kapabilitas esok. (Gereffi et al., 2022; Rodrik, 2018)

Dari perspektif negara, kedaulatan modern berarti kemampuan memilih dan bertindak dalam jaringan, bukan ilusi hidup di luar jaringan. Pemerintah memang memiliki alasan sah untuk bertindak ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, atau risiko sistemik. Namun alasan tersebut tidak otomatis membenarkan semua intervensi. Instrumen perlu sebanding dengan masalah, terbuka terhadap pengawasan, dan dievaluasi berdasarkan hasil. Ketika tujuan keamanan dipakai terlalu luas, proteksi dapat berubah menjadi hak istimewa; ketika efisiensi dipakai terlalu sempit, ketergantungan kritis dapat diabaikan. Jalan tengahnya adalah kapasitas negara yang mampu mengumpulkan informasi, berdialog dengan industri tanpa ditangkap kepentingan, menetapkan target, dan menghentikan dukungan yang tidak menghasilkan pembelajaran. (Gereffi et al., 2022; Rodrik, 2018)

Dimensi sosialnya terlihat ketika nilai tambah sejati mencakup pengetahuan, upah layak, penerimaan publik, pemasok domestik, serta ekosistem yang pulih. Perubahan agregat sering tampak kecil dalam statistik nasional, tetapi dampaknya terkonsentrasi pada pekerjaan, kota, kelompok umur, atau jenis usaha tertentu. Orang tidak berpindah sektor semudah modal di atas kertas. Rumah, keluarga, jejaring sosial, dan keterampilan bersifat melekat pada tempat. Oleh sebab itu, kompensasi setelah kerugian terjadi saja tidak cukup. Kebijakan harus mempersiapkan transisi melalui informasi pasar kerja, pendidikan yang modular, pengakuan kompetensi, pembiayaan pelatihan, transportasi, perumahan, dan jaminan pendapatan yang menjaga keberanian mengambil risiko. Globalisasi memperoleh legitimasi ketika mobilitas ekonomi menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar janji rata-rata. (Gereffi et al., 2022; Rodrik, 2018)

Dilihat dari hubungan internasional, kepercayaan sosial tumbuh ketika aturan konsisten dan biaya transformasi dibagi secara terbuka. Aturan nasional kini berinteraksi dengan perjanjian dagang, standar teknis, rezim data, pembiayaan pembangunan, dan strategi keamanan negara lain. Kebijakan yang tampak domestik dapat memengaruhi lokasi investasi atau memicu tindakan balasan. Sebaliknya, standar luar negeri dapat menjadi insentif modernisasi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi karena itu harus dimulai dari pemahaman teknis yang kuat dan koordinasi antarlembaga. Posisi tawar tidak hanya berasal dari ukuran pasar, tetapi dari konsistensi, kemampuan menawarkan solusi, koalisi dengan negara berkepentingan serupa, dan reputasi memenuhi komitmen. Otonomi strategis tumbuh dari banyak pilihan yang kredibel. (Gereffi et al., 2022; Rodrik, 2018)

Bagi Indonesia, Indonesia dapat menjadi pemenang baru jika memadukan ambisi industrialisasi dengan disiplin pembelajaran, tata kelola, dan orientasi pada manusia. Pertanyaan operasionalnya adalah

bagaimana menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam urutan kebijakan yang realistis. Prioritas pertama ialah membangun data dasar dan memilih titik lemah yang benar-benar sistemik. Prioritas kedua ialah memperkuat prasyarat lintas sektor—listrik andal, logistik, talenta, kepastian hukum, laboratorium, pembiayaan, serta konektivitas digital. Prioritas ketiga ialah memberi dukungan selektif dengan target yang dapat diaudit. Prioritas keempat ialah memperluas manfaat melalui pemasok lokal, pekerja, daerah, dan inovator. Dengan urutan ini, nasionalisme ekonomi tidak berhenti pada kepemilikan simbolis, tetapi menjadi kemampuan menghasilkan, belajar, memperbaiki mutu, dan bersaing secara berkelanjutan. (Gereffi et al., 2022; Rodrik, 2018)

Glossarium

Autarki: Kondisi ketika negara berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri dengan ketergantungan minimal pada perdagangan luar negeri.

Carbon border adjustment: Pengenaan biaya karbon pada barang impor agar biaya emisinya sebanding dengan produk domestik.

Chokepoint: Simpul jaringan yang sulit digantikan sehingga penguasanya dapat membatasi akses atau transaksi.

Decoupling: Pemisahan luas hubungan ekonomi, teknologi, atau keuangan antara negara atau blok.

De-risking: Pengurangan ketergantungan dan kerentanan berlebihan tanpa memutus keseluruhan hubungan ekonomi.

Digital sovereignty: Kemampuan suatu negara atau masyarakat menentukan aturan, infrastruktur, dan penggunaan data serta teknologi digitalnya.

Eksternalitas pengetahuan: Manfaat pengetahuan yang menyebar ke pihak lain dan tidak seluruhnya dapat ditangkap oleh penciptanya.

Fragmentasi geoekonomi: Pecahnya arus perdagangan, investasi, teknologi, dan keuangan mengikuti pertimbangan geopolitik.

Friend-shoring: Pemindahan atau pemusatan kegiatan produksi pada negara yang dipandang sebagai mitra politik terpercaya.

Global value chain/GVC: Pembagian tahap produksi barang atau jasa di antara perusahaan dan negara yang berbeda.

Hilirisasi: Upaya meningkatkan pengolahan lanjutan dan nilai tambah sumber daya atau produk di dalam negeri.

Interdependensi yang dipersenjatai: Pemanfaatan posisi sentral dalam jaringan ekonomi global untuk mengawasi, menekan, atau membatasi pihak lain.

Just-in-case: Strategi menyediakan redundansi, persediaan, atau pemasok alternatif untuk menghadapi gangguan.

Just-in-time: Sistem produksi dengan persediaan minimum dan pasokan yang tiba sesuai kebutuhan.

Kandungan domestik: Bagian nilai suatu produk atau ekspor yang benar-benar diciptakan di dalam negeri.

Kebijakan industri: Tindakan publik yang sengaja mengubah struktur produksi dan kemampuan teknologi suatu perekonomian.

Keterbukaan strategis: Keterlibatan aktif dalam ekonomi global sambil mengelola risiko, memperkuat kemampuan domestik, dan menjaga ruang pilihan.

Nearshoring: Pemindahan produksi lebih dekat ke pasar tujuan.

Reshoring: Pemindahan kembali produksi dari luar negeri ke negara asal perusahaan.

Resiliensi: Kemampuan mengantisipasi, menyerap, menyesuaikan diri, dan pulih dari guncangan.

Rules of origin: Aturan untuk menentukan asal ekonomi barang dalam penerapan tarif atau fasilitas perdagangan.

Trade in value added: Pengukuran perdagangan berdasarkan nilai yang diciptakan tiap negara, bukan nilai bruto barang yang melintasi perbatasan.

Weaponized interdependence: Lihat interdependensi yang dipersenjatai; istilah untuk penggunaan asimetri jaringan sebagai sumber kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). The China shock: Learning from labor-market adjustment to large changes in trade. *Annual Review of Economics*, 8, 205–240. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080315-015041>
- Baldwin, R., & Freeman, R. (2022). Risks and global supply chains: What we know and what we need to know. *Annual Review of Economics*, 14, 153–180. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051420-113737>
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

- Gereffi, G. (2020). What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains? The case of medical supplies. *Journal of International Business Policy*, 3, 287–301.
<https://doi.org/10.1057/s42214-020-00062-w>
- Gereffi, G., Pananond, P., & Pedersen, T. (2022). Resilience decoded: The role of firms, global value chains, and the state in COVID-19 medical supplies. *California Management Review*, 64(2), 46–70.
<https://doi.org/10.1177/00081256211069420>
- Goldberg, P. K., & Reed, T. (2023). Is the global economy deglobalizing? And if so, why? And what is next? (NBER Working Paper No. 31115). National Bureau of Economic Research.
<https://doi.org/10.3386/w31115>
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 3–43.
<https://doi.org/10.1257/jel.20171452>
- Harrison, A., & Rodríguez-Clare, A. (2010). Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries. In D. Rodrik & M. Rosenzweig (Eds.), *Handbook of Development Economics* (Vol. 5, pp. 4039–4214). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52944-2.00001-X>
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>
- Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. *Science*, 317(5837), 482–487. <https://doi.org/10.1126/science.1144581>
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575. <https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106>
- International Monetary Fund. (2023). Geoeconomic fragmentation and foreign direct investment. In *World Economic Outlook, April 2023: A rocky recovery* (Chap. 4). <https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/english/ch4.pdf>
- Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W.-c. (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*, 51, 577–622. <https://doi.org/10.1057/s41267-019-00262-4>
- Lin, J. Y., & Chang, H.-J. (2009). Should industrial policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang. *Development Policy Review*, 27(5), 483–502. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2009.00456.x>
- Mazzucato, M. (2013). Financing innovation: Creative destruction vs. destructive creation. *Industrial and Corporate Change*, 22(4), 851–867. <https://doi.org/10.1093/icc/dtt025>
- OECD. (2024). Risks and resilience in global trade. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/risks-and-resilience-in-global-trade_1c66c439-en.html
- OECD. (2025). Harnessing trade and environmental policies to accelerate the green transition. OECD Publishing. [https://one.oecd.org/document/COM/TAD/ENV/JWPTE\(2024\)6/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/COM/TAD/ENV/JWPTE(2024)6/FINAL/en/pdf)

OECD. (2026). Trends in global value chains. OECD Publishing.

https://www.oecd.org/en/publications/trends-in-global-value-chains_8217c2ff-en.html

Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. CEPR Discussion Paper No. 4767.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.666808>

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>

Strange, R., & Zucchella, A. (2017). Industry 4.0, global value chains and international business.

Multinational Business Review, 25(3), 174–184. <https://doi.org/10.1108/MBR-05-2017-0028>

World Bank. (2020). World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>

World Bank. (2023). State and trends of carbon pricing 2023. <https://doi.org/10.1596/39796>

World Trade Organization. (2023). World trade report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr23_e/wtr23_e.pdf